

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dimana adanya amanat bahwa keuangan daerah agar dapat dikelola dengan cara tertib, efisien dan efektif, bertanggung jawab dengan asas keadilan, transparan, dan memiliki manfaat untuk masyarakat (Prandono dan Basukianto,2015). Melalui pelaporan keuangan pemerintah, informasi mengenai keuangan dapat diakses oleh berbagai pihak seperti warga masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan instansi pemeriksaan keuangan. Begitu pula dengan pihak yang berperan dalam donasi, investasi, dan peminjaman (Pancawati, 2009). Kebutuhan informasi laporan keuangan di kalangan masyarakat semakin besar, dimana informasi yang disajikan sektor publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar, tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban saja, melainkan adanya kepatuhan dan kesesuaian dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Suryanto, 2017).

Q.S. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari

bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak akan mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Meskipun ayat di atas tidak secara langsung pada pelaporan keuangan, akan tetapi prinsip yang diberikan memiliki arti bahwa pentingnya pengeluaran dana dari hasil yang baik-baik, menjauhi yang buruk, dan melakukan pengeluaran dengan penuh pertimbangan. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD untuk Tahun Anggaran 2017 s.d. 2022 di Wilayah D.I. Yogyakarta

No	Entitas	Tahun	Opini LKDP
1	Provinsi DIY	2022	WTP
2	Kabupaten Bantul		WTP
3	Kabupaten Gunung Kidul		WDP
4	Kabupaten Kulon Progo		WTP
5	Kabupaten Sleman		WTP
6	Kota Yogyakarta		WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Berdasarkan tabel 1.1 di atas, opini BPK pada tahun 2022 Pemda Sleman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2021 Nomor 9 B/LHP/XVIII.YOG/04/2022. Opini tersebut telah sesuai dengan

target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk yang keduabelas kalinya sejak Laporan Keuangan Pemda Sleman tahun 2011 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2022). Akan tetapi, melalui hasil ulasan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY masih dijumpai laporan yang ketidaksesuaian terhadap format laporan, regulasi pusat, dan kebijakan akuntansi. Selain itu, adanya kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat serta sarana dan prasarana kantor yang kurang mendukung operasional BUKP menjadi tantangan yang dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, demikian pula dengan BPKA Sleman sebagai institusi pengelola keuangan aset Pemda Sleman.

Laporan keuangan dari seluruh entitas pemerintahan daerah harus dilakukan dengan baik, yaitu konsisten, transparan, dan tepat waktu. Entitas yang dapat melaporkan keuangan dengan baik maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas (Steccolini, 2002). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban serta tanggung jawab entitas dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, niat untuk menggunakan pelaporan keuangan berkaitan erat dengan tekad untuk mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan fakta. Akuntabilitas dalam hal ini menunjukkan bahwa entitas memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan yang rasional dan memiliki alasan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan dalam laporan keuangan. Niat ini juga menunjukkan adanya komitmen untuk pengambilan keputusan yang akurat dan sesuai dengan data yang ada.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones, Gregory, dan Blancheet, 2000). Tingkat penggunaan data dalam pelaporan keuangan juga bergantung pada kegunaan keputusan dari data yang ada, dimana menyangkut potensi manfaat data bagi pengguna, baik dilihat dari relevansi, kesesuaian dengan harapan, dan lainnya (Mack dan Ryan, 2006).

Penggunaan dari laporan keuangan secara rinci memiliki tujuan, yaitu untuk memperkirakan kebutuhan arus kas, penilaian kinerja, atau menghitung biaya layanan (Kober, Lee, dan Ng, 2010). Kelompok yang paling dominan dalam penggunaan laporan keuangan, yaitu pengguna laporan keuangan. Pengguna adalah orang atau lembaga yang memiliki ketertarikan dalam menerima informasi atau menggunakan laporan keuangan dalam menghadapi masalah keuangan. Beberapa sudut pandang menyatakan bahwa penerima dan pengguna laporan keuangan adalah hal yang berbeda, dimana penerima tidak harus juga menggunakan informasi atau laporan keuangan untuk tujuan tertentu (Helden dan Reichard, 2019). Dalam hal ini, penggunaan laporan keuangan dalam pemerintahan daerah menjadi hal yang penting untuk menghadapi permasalahan keuangan. Akan tetapi, Mack (2004) menegaskan bahwa pengguna laporan keuangan juga memiliki ketergantungan atas penyediaan informasi keuangan yang ada (seperti anggaran yang bertuju kepada pemilih, penyedia sumber daya seperti

pajak pembayar, pemberi pinjaman, pemasok dan kosumen barang dan jasa, badan pengawas, regulator, auditor, lembaga pemeriksa, dan perwakilan oragnisasi sektor publik lainnya).

Akuntansi lingkungan juga menjadi suatu perhatian dalam penggunaan laporan keuangan, yaitu perusahaan harus memperhatikan masalah lingkungan yang menjadi aspek penting untuk segera ditindaklanjuti dan diatasi dengan cepat. Dibandingkan dengan masalah ekonomi, teknologi, ataupun politik, masalah lingkungan memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi (Javed, Akhtar, Husnain, Lodhi, dan Emaan, 2020). Akuntansi lingkungan merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fungsi dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam maksud mengelola lingkungan. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan terutama bagi pemerintah daerah dapat mendorong kemampuan dalam meminimalisir permasalahan lingkungan yang dihadapi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek (Sukirman dan Suciati, 2019).

Rangkaian aturan dan prosedur akuntansi telah dikembangkan selama waktu yang lama. Periode ini mencerminkan perubahan dalam bisnis, teknologi (seperti penggunaan komputer dan komunikasi), dan pemerintahan (tingkat lokal, nasional, dan internasional). Standar akuntansi telah beradaptasi dengan perubahan ini dan telah mengalami pergeseran besar dalam memenuhi kebutuhan pelaporan bagi berbagai

pihak yang tertarik. Sekarang, dengan peningkatan peran perlindungan lingkungan dan regulasi lingkungan, pelaporan keuangan (penyajian dan pengungkapan informasi) menghadapi tantangan ekstra dalam konteks standar dan prosedur akuntansi. Hubungan antara dampak lingkungan dan hasil keuangan menjadi penting bagi perusahaan: seperti apa dampaknya pada lingkungan, bagaimana perusahaan mengendalikan dampak tersebut, dan akibat keuangan apa yang dihadapi perusahaan. Membangun hubungan ini adalah tugas yang menantang bagi perusahaan, profesi akuntansi, dan juga bagi berbagai pihak yang tertarik pada perlindungan lingkungan (Coulson, 2002).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, yang membahas tentang Pengaturan Tanggung Jawab Keuangan di Daerah beserta prosedur pengawasan, penyusunan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam intinya, peraturan tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengimplementasikan sistem akuntansi dalam mengelola keuangan daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah dengan tujuan agar sistem ini dapat membawa transparansi dan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan daerah. Hal ini mencakup berbagai hal, seperti Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah. Kejelasan dan keterbukaan kepada publik harus menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2001

mengenai informasi keuangan daerah, tujuannya bukanlah untuk menghalangi hak pemerintah daerah, melainkan sebagai dorongan bagi mereka agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat menjadi lebih transparan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peemendagri) No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi rangkaian dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan pada konteks pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Pelaporan mampu dilakukan secara manual atau dengan memanfaatkan perangkat lunak computer. Dimana sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang andal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2004).

Tekanan pula dapat memberikan dorongan bagi sebuah pemerintah daerah untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pihak di luar pemerintah daerah tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah daerah tentu akan memperhatikan aspirasi dari berbagai kelompok. Tekanan dari berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang transparan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai pihak yang mendapatkan mandat dari pihak terkait. Tekanan dari pihak-pihak terkait mampu membuat pemerintah lebih terbuka. Keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah mampu memberikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Penelitian oleh Halmawati dan Mustin (2015) dan Purnamasari (2015) juga telah

membuktikan bahwa tekanan memiliki efek positif yang signifikan terhadap transparansi penggunaan pelaporan keuangan.

Laporan keuangan secara umum diterima sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan pemerintah daerah kepada para penggunanya termasuk masyarakat. Laporan keuangan diidentifikasi sebagai rangkuman informasi laporan keuangan, seperti informasi keuangan, kinerja, risiko dan keuntungan bisnis, serta informasi relevan lainnya. Meskipun perusahaan menggunakan laporan keuangan dalam upaya untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan mereka kepada berbagai pihak, efektivitas laporan keuangan sebagai informasi keuangan memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Alam dan Rashid, 2014). Efektivitas laporan keuangan dapat diidentifikasi dengan menganalisis sejauh mana berbagai pihak memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan. Intensitas penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pelaporan keuangan yang bermanfaat (Widiastuti dan S, 2019).

Kegunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan tetap menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Meskipun keberadaan laporan keuangan sudah banyak diterima, akan tetapi masih terdapat masalah dialog asimetris, yaitu informasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan tidak memenuhi kebutuhan beberapa pengguna (Gowthorpe, 2004). Pemerintah daerah memerlukan umpan balik tentang efektivitas laporan keuangan dari para pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi akuntansi lingkungan, sistem akuntansi keuangan

daerah, tekanan (*pressure*), dan laporan keuangan yang bermanfaat (*perceived usefulness*) terhadap niat menggunakan laporan keuangan (*intention to use*). Berdasarkan pengetahuan peneliti, saat ini belum ada penelitian yang menganalisis efek tekanan dan laporan keuangan yang bermanfaat terhadap niat menggunakan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan konteks Indonesia tepatnya Pemda Sleman, yang memiliki beragam budaya dan perbedaan geografis dibandingkan dengan negara-negara lain.

Selain itu masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Makori (2013) dimana penelitian tersebut menemukan hubungan negatif antara akuntansi lingkungan dan juga metrik kegunaan pelaporan keuangan, dengan demikian menunjukkan instansi relatif menggunakan biaya yang relatif tinggi ketika menerapkan praktik akuntansi. Akan tetapi Beer (2006) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan dapat meningkatkan kegunaan keuangan dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi aktifitas dan kinerja ekonomi. Disisi lain, penelitian Susanto (2015) menjelaskan bahwa identifikasi elemen dan rasio dari laporan keuangan lokal berguna (*positif*) terhadap perencanaan, dan kegunaan keuangan. sedangkan Alijarde (1997) menekankan potensi kegunaan pelaporan keuangan lokal, bagi pengembangan daerah itu sendiri dan perlunya mencatat kemajuan dalam penggunaan keuangan tersebut.

Widiastuti (2019) menjelaskan bahwa kegunaan dan kemudahan penggunaan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakannya dalam

pengambilan keputusan, sedangkan kegunaan pelaporan keuangan untuk terhadap intensitas penggunaan pelaporan keuangan sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan (Pawlowski, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2018) menjelaskan bahwa faktor seperti pengawasan, pengendalian, penempatan kerja, fasilitas, integritas, dan juga tekanan dapat mempengaruhi intensitas penggunaan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Van Helden et al. (2019), dimana didalam penelitian sebelumnya dilakukan di sektor publik yang ada di Belanda, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di OPD yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Didalam penelitian ini juga terdapat variabel *Environmental Accounting*, *Local Financial Accounting*, *Usefulness Financial* dan *Pressure* sebagai variable Independen, dan juga terdapat variable *Intention to Use Financial* sebagai variable dependen. Dimana terdapat pembaharuan penelitian yaitu penambahan *usefulness financial* dan *environmental accounting* sebagai variabel independent baru yang merupakan kontribusi baru didalam penelitian ini

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya pada Pemda Sleman, yang merupakan wilayah khusus yang menerima dana hak istimewa dari pemerintah pusat. Pihak eksternal, seperti lembaga legislatif, telah membentuk komite khusus untuk mengawasi penggunaan dana istimewa (Atmasari, 2016). Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan juga mengkaji setiap variable dari akuntansi

lingkungan, sistem akuntansi keuangan daerah, tekanan (*pressure*), dan laporan keuangan yang bermanfaat terhadap niat menggunakan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan variabel *Environmental Accounting*, *Local Financial Accounting*, *Usefulness Financial* dan *Pressure* serta *Intention to Use Financial* yang mencakup ruang lingkup OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan demikian, maka peneliti merumuskan judul untuk penelitian ini adalah **“THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING, LOCAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS, AND PRESSURE ON INTENTION TO USE FINANCIAL REPORTING WITH USEFUL FINANCIAL REPORTING AS A MEDIATION VARIABLE”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Akuntansi Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Niat Untuk Menggunakan Pelaporan Keuangan?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Niat Untuk Menggunakan Pelaporan Keuangan?
3. Apakah tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk menggunakan pelaporan keuangan?
4. Apakah akuntansi lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk menggunakan laporan keuangan melalui kegunaan laporan keuangan?

5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kegunaan laporan keuangan melalui niat untuk menggunakan pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntansi lingkungan terhadap niat untuk menggunakan pelaporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap niat untuk menggunakan pelaporan keuangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan terhadap niat untuk menggunakan pelaporan keuangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan laporan keuangan melalui kegunaan laporan keuangan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kegunaan laporan keuangan melalui niat untuk menggunakan pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi secara ilmiah dengan menjadi referensi bagi para peneliti lain. Dalam penelitian ini memanfaatkan variabel yang sudah diteliti serta menambahkan pelaporan keuangan yang bermanfaat

sebagai variabel mediasi pada organisasi tingkat daerah di berbagai kabupaten. Penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat melengkapi kajian literatur yang ada untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan pelaporan keuangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mempertimbangkan faktor pada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam membantu mereka memahami perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.